



BPKD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH - PROVINSI DKI JAKARTA

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

PELUANG DAN TANTANGAN AKUNTAN SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

MICHAEL ROLANDI CESNANTA BRATA

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Selasa, 14 November 2023



Untuk mewujudkan
Akuntabilitas
Keuangan
Fully Accrual Basis
dan Tantangan
Masa Depan

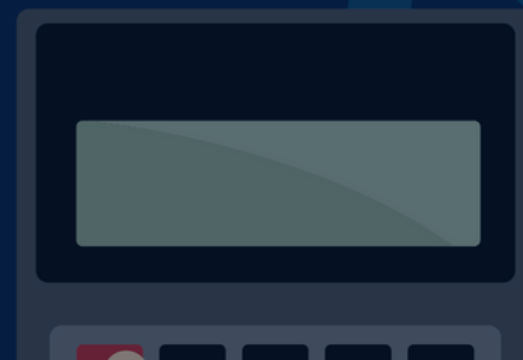
Akuntan
perlu
memahami



**PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

**PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
DI ERA 4.0**

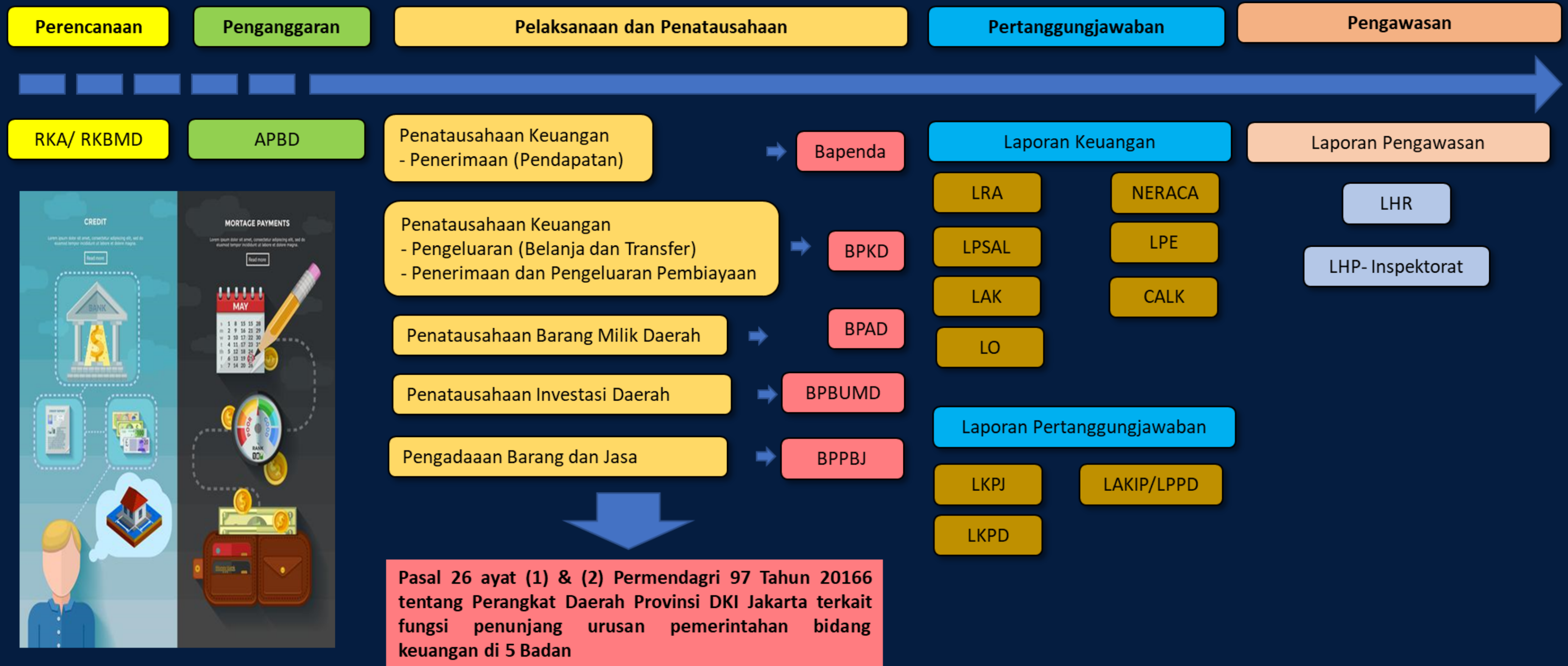
**STRATEGI JAKARTA
MENUJU
GLOBAL CITY**



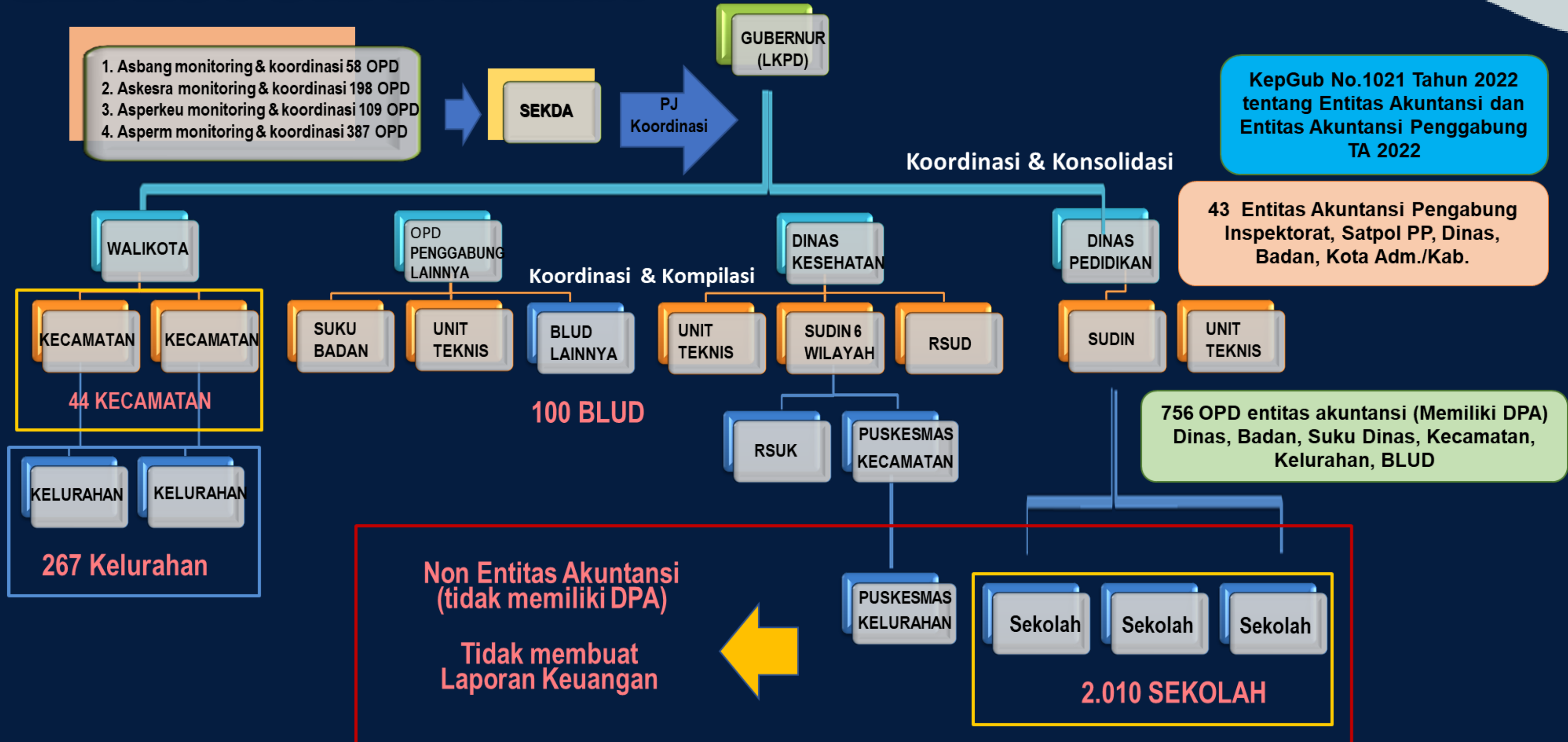


PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

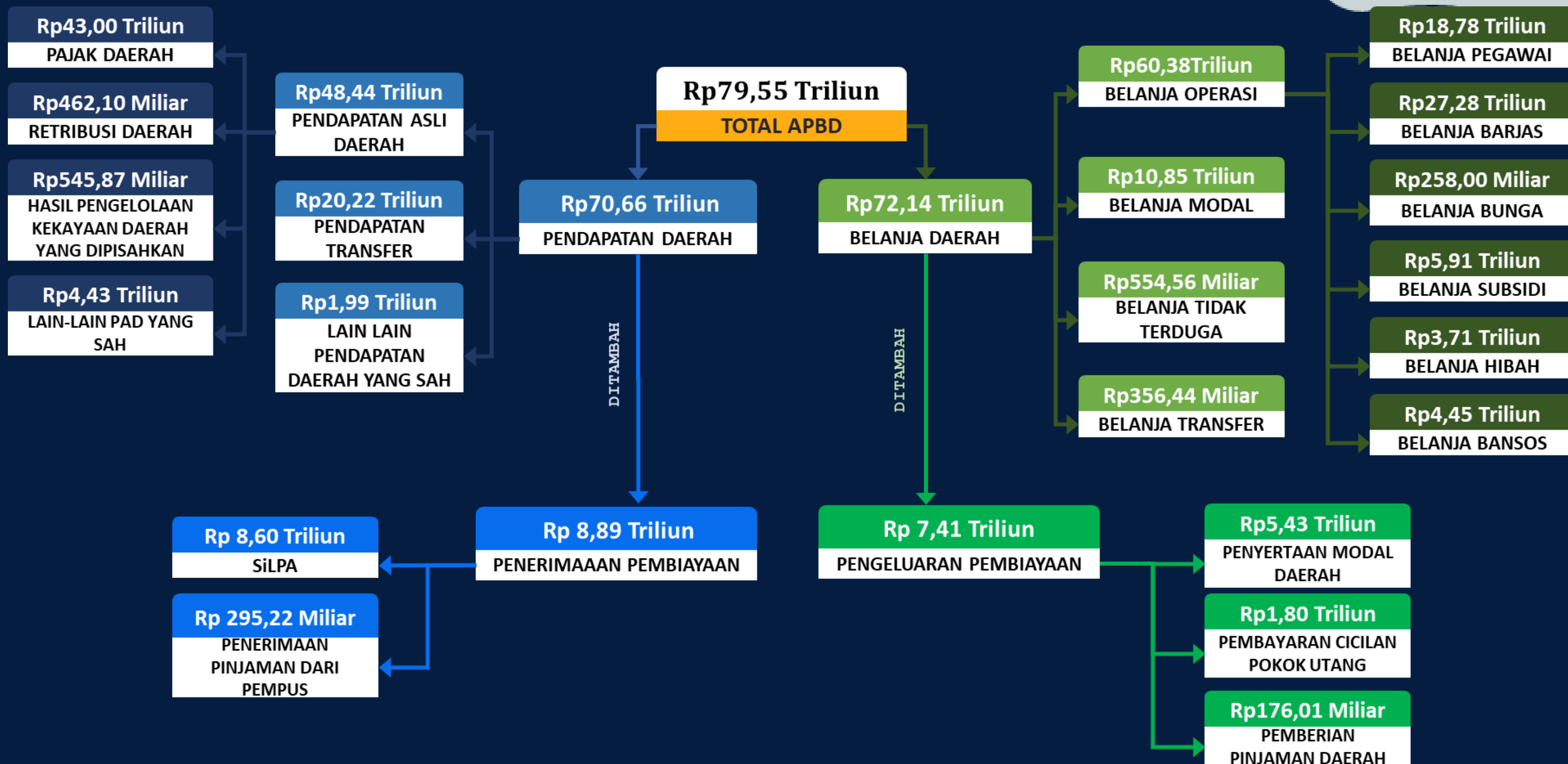
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



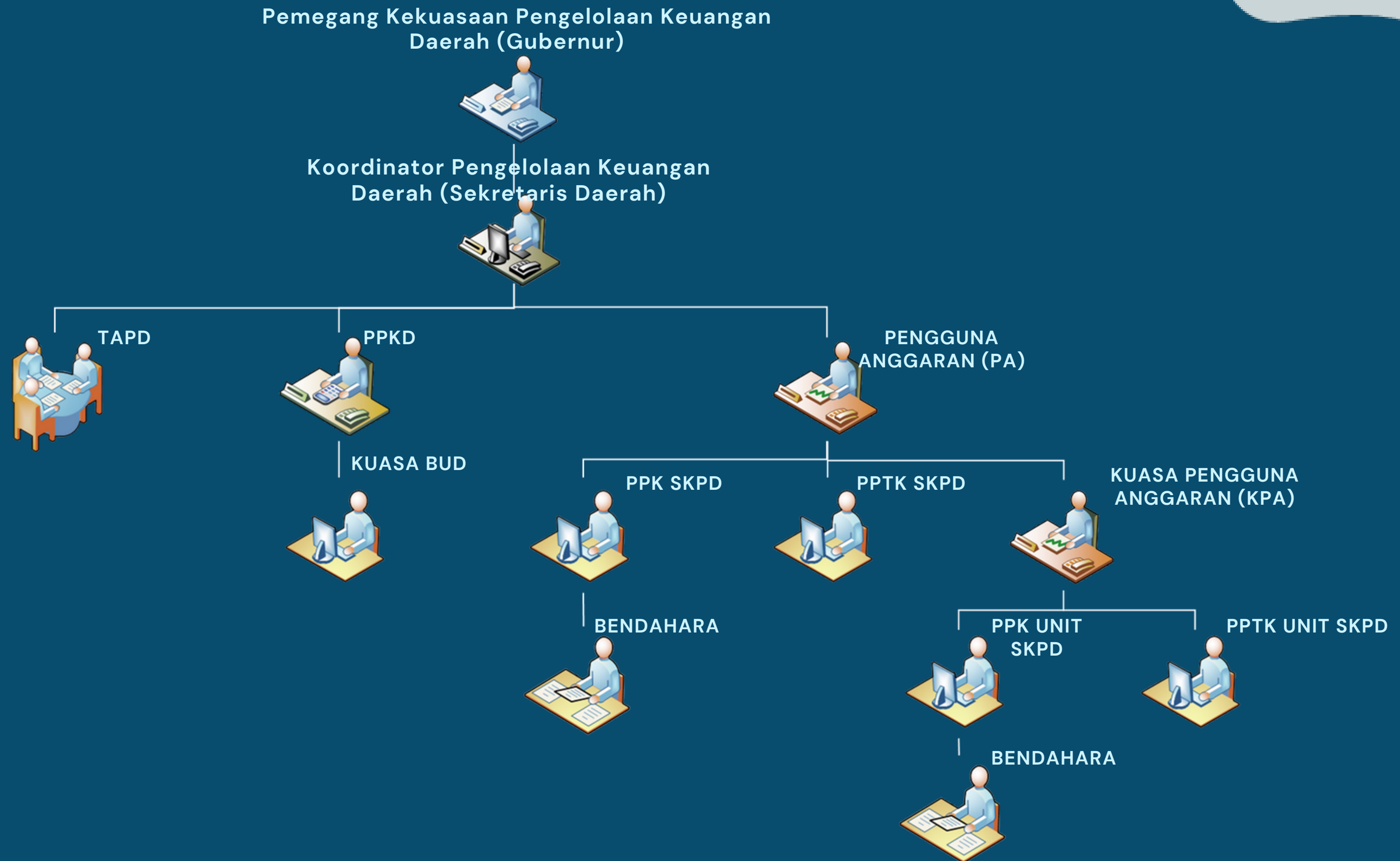
UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN PEMROV DKI JAKARTA



POSTUR APBD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023



PENGELOLA KEUANGAN DAERAH





BPKD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH - PROVINSI DKI JAKARTA

PEJABAT DENGAN LATAR BELAKANG AKUNTANSI DI PEMPROV DKI JAKARTA



**Joko Agus
Setyono**

Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta



**Syaefuloh
Hidayat**

Inspektur DKI Jakarta



**Michael Rolandi
Cesnanta Brata**

Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan
Daerah



**Lusiana
Herawati**

Kepala Badan
Pendapatan Daerah
dan Plt. Kepala Badan
Pengelolaan Aset
Daerah



Fatimah

Wakil Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan
Daerah



JABATAN YANG BERKAITAN DENGAN KEMAMPUAN AKUNTANSI DI PEMDA

Kepala SKPD

- > Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKD)
- > Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD)
- > Inspektur DKI Jakarta
- > Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
- > Badan Pengelolaan BUMD

Pejabat Lainnya

- > Sekretaris BPKD
- > Kepala Bidang Akuntansi
- > Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
- > Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan
- > Kepala Bidang Anggaran

Kepala Subbagian

- > Kepala Subbagian Keuangan
- > Kepala Subbagian Aset
- > Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran

Jabatan Fungsional

- > Analis Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri dari:
 - Analis Pelaksana Anggaran
 - Analis pengelolaan Kas dan perbendaharaan
 - Analis manajemen investasi
 - Analis pengelolaan keuangan BLUD
 - Analis pelaporan keuangan
- > Auditor
- > Widyaiswara



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA 4.0



RANCANGAN MODEL INTEGRATED FINANCIAL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET



UPAYA DIGITALISASI TRANSAKSI YANG TELAH DILAKUKAN IMPLEMENTASI NON TUNAI SECARA BERTAHAP DI DUKUNG DASAR HUKUM SECARA MEMADAI



BPKD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH - PROVINSI DKI JAKARTA

KOMITMEN

**PENGGUNAAN UANG TUNAI
MAX Rp 100 JUTA**

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 151 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON-CASH)

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI ONLINE (TRANSAKSI NON-CASH)

**PENGGUNAAN UANG TUNAI
MAX Rp 25 JUTA**

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 256 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON-CASH)

**PENGGUNAAN UANG TUNAI
MAX Rp 2,5 JUTA**

**SELURUH TRANSAKSI
NON TUNAI**

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON-CASH)

NILAI TAMBAH INOVASI TRANSAKSI NON TUNAI

							
BEFORE	Belanja makan minum melekat di kegiatan, terjadi manipulasi pertanggungjawaban belanja	Belanja ATK melekat di kegiatan, terjadi manipulasi pertanggungjawaban belanja	Terjadinya pemutusan listrik oleh PLN atas SKPD yang tidak tersedia anggarannya	Pengadaan outsourcing melalui pihak ketiga sehingga pekerjaan dan pembayaran tidak terkontrol	Belanja BBM melalui kupon sehingga dapat digunakan untuk mengisi kendaraan secara tidak sah	Belanja Poto Copy di masing-masing SKPD dengan mekanisme pengadaan langsung, mahal dan tidak berkualitas	Perawatan di bengkel yang ditunjuk SKPD melalui penunjukan langsung, mahal dan tidak berkualitas
AFTER	Sentralisasi belanja makan minum di sekretariat, tidak ada manipulasi pertanggungjawaban	Sentralisasi Belanja ATK, Lelang konsolidasi, tidak ada manipulasi pertanggungjawaban	Pembayaran listrik di talangi oleh Bank DKI dengan skema kartu kredit sehingga tidak terjadi pemutusan listrik	Pengadaan melalui kontrak perorangan, diawasi secara ketat, dan pembayaran langsung ke rekening pegawai	Belanja BBM melalui RFID sehingga hanya kendaraan yang sah sesuai RFID yang dapat diisi BBM	Sewa melalui Lelang konsolidasi, sehingga lebih murah dan berkualitas	Perawatan melalui bengkel ATPM sehingga lebih terjamin kualitas maupun harga

AKUNTABILITAS REALISASI APBD PROVINSI DKI JAKARTA PADA WEBSITE DASHBOARD YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK

dashboard-bpkd.jakarta.go.id/akun

Gmail YouTube Maps

BPKD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH - PROVINSI DKI JAKARTA

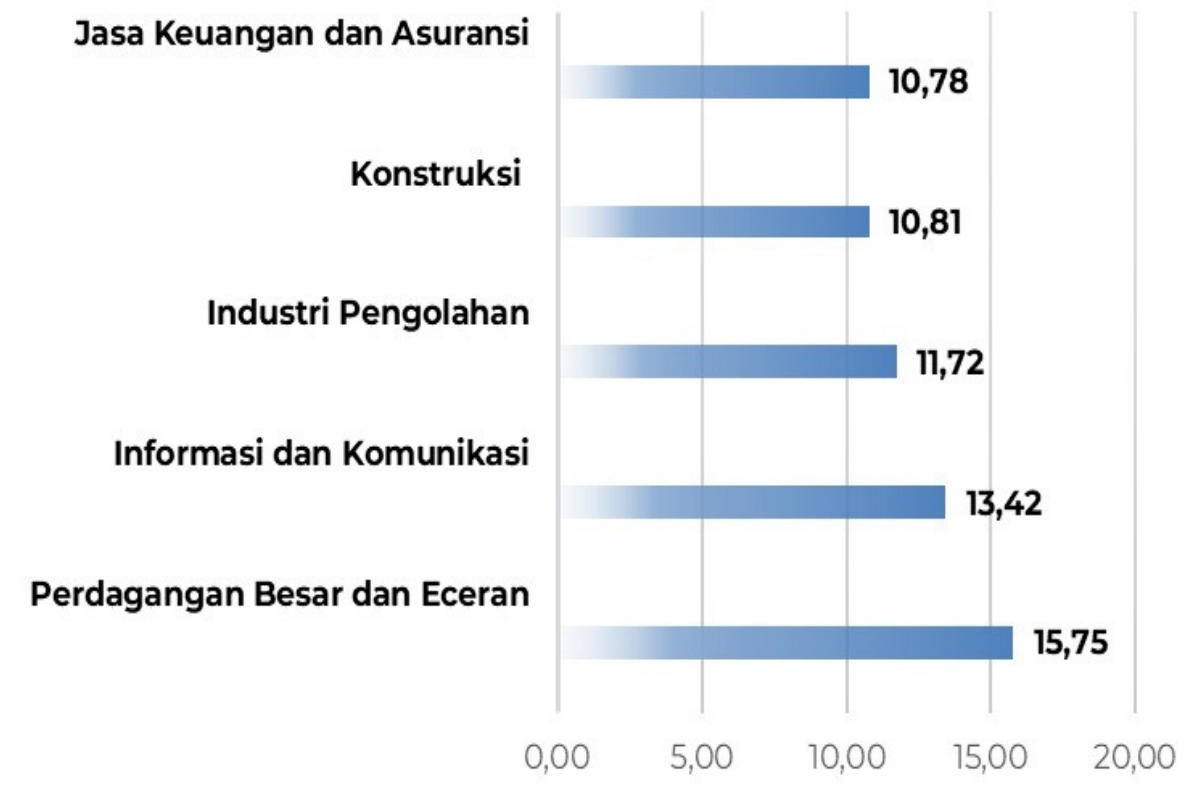
DASHBOARD KEUANGAN DAERAH PEMROV DKI JAKARTA

REALISASI ANGGARAN PER-AKUN Dashboard / Akun

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4. PENDAPATAN				
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pajak Daerah	43.000.000.000.000	37.377.050.255.356	86,92
4.1.02	Retribusi Daerah	462.105.437.613	379.828.049.479	82,20
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	545.869.249.882	533.515.670.948	97,74
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.434.068.961.336	3.544.311.320.309	79,93
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48.442.043.648.831	41.834.705.296.092	86,36
4.2. PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	20.224.315.057.470	10.903.016.315.973	53,91
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		20.224.315.057.470	10.903.016.315.973	53,91
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.996.577.429.044	27.875.152.064	1,40

Jakarta: Pusat Kegiatan Ekonomi Terbesar di Indonesia

5 Sektor dengan Kontribusi PDRB Tertinggi (%)



Penduduk Jakarta: 10,7 juta jiwa/
3,9% populasi nasional

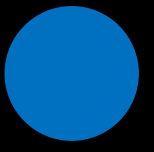
PDRB: Rp 3.200 triliun/
16,6% *share* nasional (tertinggi)

BONUS DEMOGRAFI
71.28% penduduk usia
produktif (7,61 juta jiwa)

Pendapatan per kapita warga
Jakarta senilai 182,91 juta

PDRB per Kapita: 17.966
USD/Rp 298 juta (tertinggi)

Realisasi penanaman modal
asing sebesar US\$ 3.7 billion/
IDR 53.8 Triliun (2022)

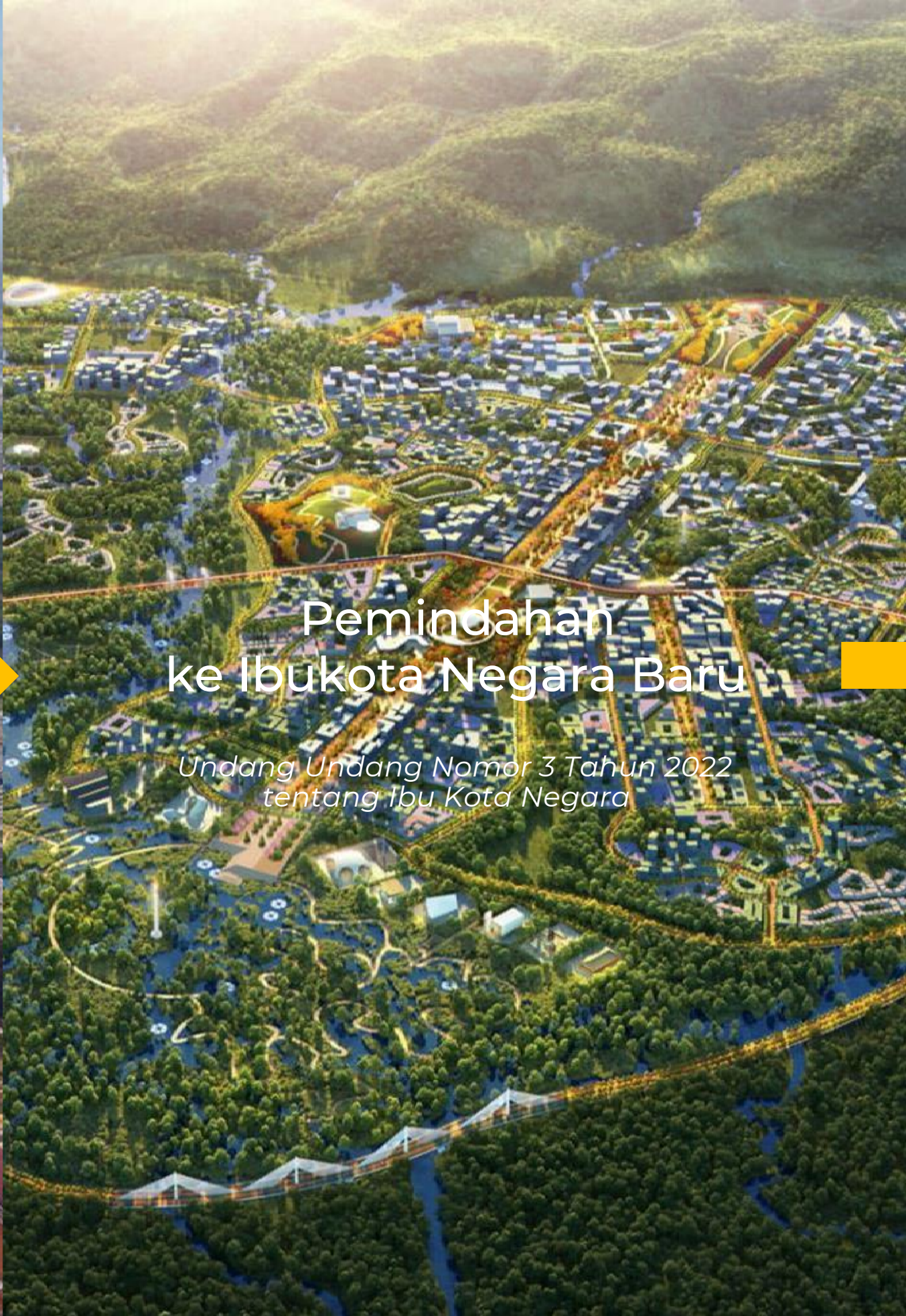




DKI Sebagai Ibukota Negara

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

Sejarah: **Pusat Pemerintahan**, Pusat Bisnis Dan Perdagangan Nusantara, Serta Sebagai Pusat Kebudayaan Nasional



Pemindahan ke Ibukota Negara Baru

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara



Jakarta Sebagai Kota Global

Visi Pembangunan: Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai **Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global**, berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa keuangan, serta **kegiatan bisnis nasional dan global**



GLOBAL CITY

*Sumber: AT Kearney, 2023

Kota yang memiliki peran penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional (menjadi *primary node* dalam jaringan ekonomi dunia) yang mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, serta informasi secara global.

Subjek*	Karakteristik <i>Global Cities</i> *
<i>Business Activity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki lebih dari 10 Top 500 <i>World Company</i> • Kapitalisasi pasar setara dengan USD 24.3 triliun Fasilitas kargo bandara dan pelabuhan yang mumpuni. • Shipping Volume Shanghai 2021 (1st):47,03 juta TEU Tergabung dalam ICCA conferences • Memiliki lebih dari 100 perusahaan unicorn
<i>Human Capital</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki > 100 universitas top 1000 dunia • Proporsi lulusan perguruan tinggi > 50% dari populasi kota • Jumlah pelajar internasional 107.000(2021)
<i>Information Exchange</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki arus pertukaran informasi yang baik • Memiliki akses TV yang baik • Memiliki lebih dari 30 juta <i>broadband subscribers</i>
<i>Cultural Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat di internet • Jumlah wisatawan internasional > 30 juta/tahun • Memiliki jumlah pusat kebudayaan museum sebanyak 240 • Menyelenggarakan 25 sporting event multi cabang dalam setahun • melakukan kerjasama sister cities dengan > 200 kota di dunia
<i>Political Engagement</i>	Memiliki jumlah sekretariat organisasi internasional sebanyak 29 sekretariat organisasi internasional termasuk (<i>Head quarters NATO, WCO, Benelux General Secretariat, Eurocontrol</i>)



Tantangan Jakarta

→ Kepadatan dan Mobilitas Penduduk

→ Unskilled Labor

→ Permukiman Kumuh

→ Kemacetan

→ Polusi Udara

→ Perubahan Iklim,

→ Banjir, Rob dan Penurunan Tanah

→ Persampahan







→ Akses Air Bersih





IDENTIFIKASI CIRI KOTA GLOBAL

Untuk menjadi kota global yang kompetitif, sebuah kota setidaknya perlu memiliki:

-  **Ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global:** Memiliki skala ekonomi yang berdaya saing, memiliki potensi (iklim) pengembangan ekonomi yang baik, memiliki sumber daya tenaga kerja yang kompetitif, dan terhubung secara global (ditunjukkan dengan keberadaan perusahaan internasional skala besar)
-  **Kapasitas riset dan inovasi yang baik dan menerus:** memiliki hasil riset dan inovasi dengan kuantitas dan kualitas yang mumpuni, memiliki iklim yang mendukung penciptaan riset dan inovasi, memiliki lembaga riset (termasuk universitas) yang kompetitif secara global
-  **Ruang yang nyaman untuk dihuni:** memiliki kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, kondisi keamanan dan konflik sosial yang terkendali, kemudahan dalam memenuhi kehidupan, biaya hidup terjangkau, hingga kualitas sumber daya manusia yang baik (kesehatan dan pendidikan), serta kemudahan mengakses informasi
-  **Menarik wisatawan untuk berkunjung:** memiliki daya tarik wisata budaya, memiliki kualitas untuk menerima event-event internasional (konser, event olahraga), memiliki infrastruktur wisata (stadion, museum, teater), dan memiliki fasilitas penunjang wisata yang memadai (hotel, restoran, hiburan malam, dll)
-  **Lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan:** memiliki kualitas lingkungan yang baik, berketahanan terhadap perubahan iklim, dan mengarah pada keberlanjutan
-  **Aksesibilitas yang terkoneksi secara intra dan inter kota:** memiliki kemudahan diakses oleh penduduk negara lain, memiliki kemudahan dan pilihan moda transportasi dalam kota, nyaman dan bebas hambatan bermobilitas di dalam kota

Global city adalah sebuah kota yang memiliki peran **penting** dalam **pengintegrasian ekonomi transnasional** (menjadi *primary node* dalam jaringan ekonomi dunia) yang **mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, serta informasi** secara **global**.

Sumber: Hasil Kajian Bappeda terhadap Indeks Kota Global





Tantangan e Depan Menuju Jakarta sebagai Kota Global



Permasalahan Jakarta merupakan permasalahan yang penanganannya bersifat lintas wilayah (*cross-boundary*)

Banjir

200-300 RW rata-rata terdampak banjir per tahun (2018-2022)[1] namun 3 kali lipat RW terdampak pada saat cuaca ekstrem (2020) [1]

[1] Olahadata BPBD DKI Jakarta 2018-2022

Rob dan Penurunan Tanah

0,1-8 cm *subsidence* per tahun (2015-2020) [2]
2,7 ribu ha area berotensi terdampak rob [3]

[2] LAPAN, 2020; [3] Olahadata Platform Pantau Banjir Jakarta

Permukiman Kumuh

10,7 ribu ha luas area RW kumuh [4]
atau 16,4% area Jakarta masih kumuh [4]

[4] Olahadata Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kemacetan

22,5 menit rata-rata waktu tempuh perjalanan 10 km [6]
sementara itu 60 menit waktu tempuh perjalanan 10 km saat *rush hour* [7]

[6] Tomtom Traffic Index, 2022; [7] Olahadata Direktorat Regional 1 Bappenas

Kepadatan Mobilitas Penduduk

Secara keseluruhan, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta mencapai 661,23 km² dengan jumlah total penduduk 11,25 juta jiwa pada Juni 2022. Artinya, kepadatan penduduk di Jakarta mencapai 17.013 jiwa/km²

Polusi Udara dan *Urban Heat Island (UHI)*

Polusi udara di Jakarta berdampak buruk pada kesehatan. Saat ini, *Air Quality Index (AQI)* di Jakarta mencapai 157, yang tergolong tidak sehat.

Rata-rata suhu udara bulanan di Jakarta pada 10 tahun terakhir meningkat dibandingkan dengan rata-rata bulanan pada dekade 1980-1990 1^o

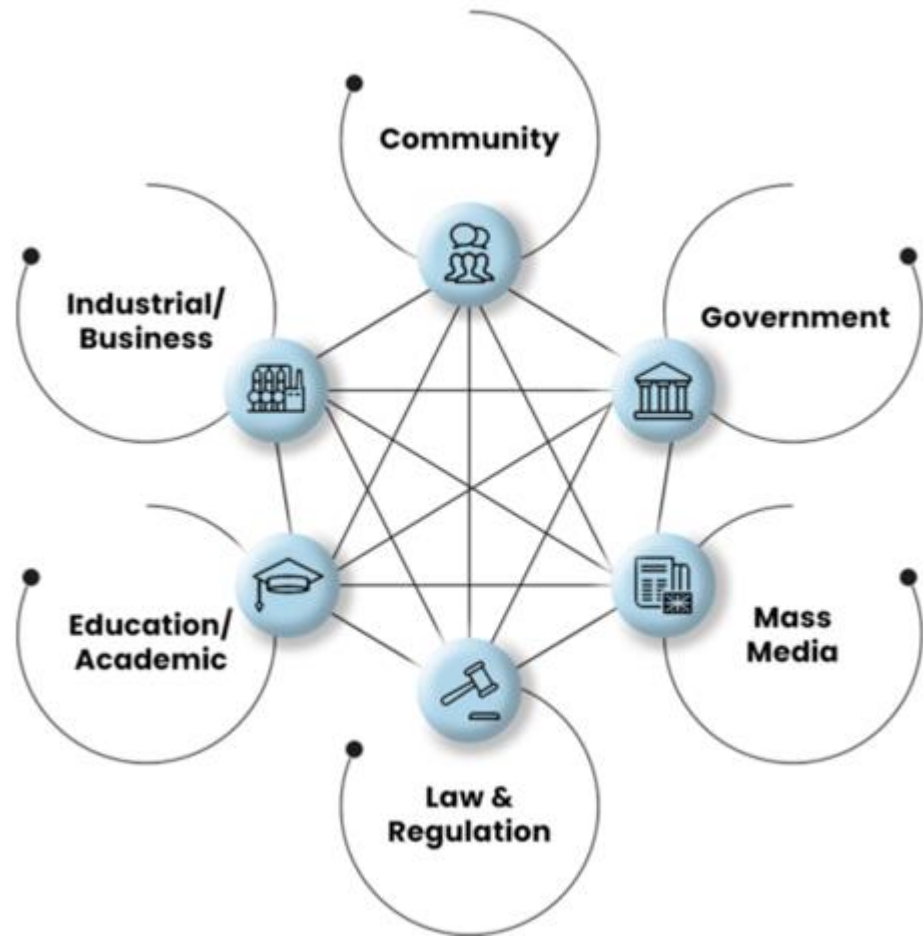
Persampahan

8,3 ribu ton timbulan sampah per hari [5]
dan 7,5 ribu ton dari timbulan sampah dikelola di luar Jakarta [5]

[5] DLH DKI Jakarta, 2023

Perencanaan Terkait Kebijakan Jangka Panjang Jakarta Menuju Kota Global

Arah kebijakansinergitaspembangunandan pembiayaan pemerintah pusat/pemerintah daerah/BUMN/BUMD/swasta



Model Kolaborasi Pentahelix menjadi kebijakan Kota Jakarta dalam pembangunan dan pembiayaan kedepan, mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah melalui instrumen APBN/APBD sehingga diperlukan kolaborasi seluruh pihak dalam proses pembangunan kota.

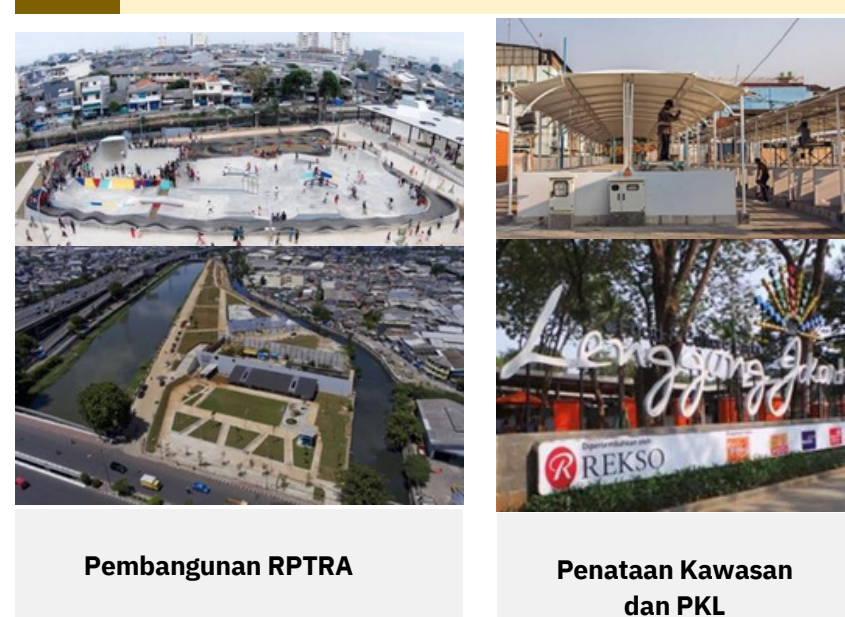
1 Disinsentif Ruang (KLB) Pemanfaatan



Pembangunan Simpang Susun Semanggi

Penataan Kali Besar, Kota Tua

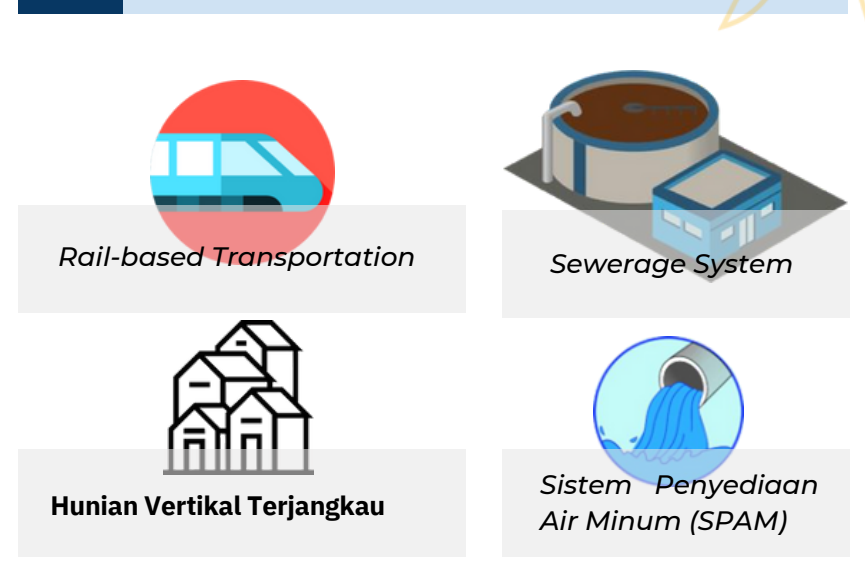
2 Corporate Social Responsibility (CSR)



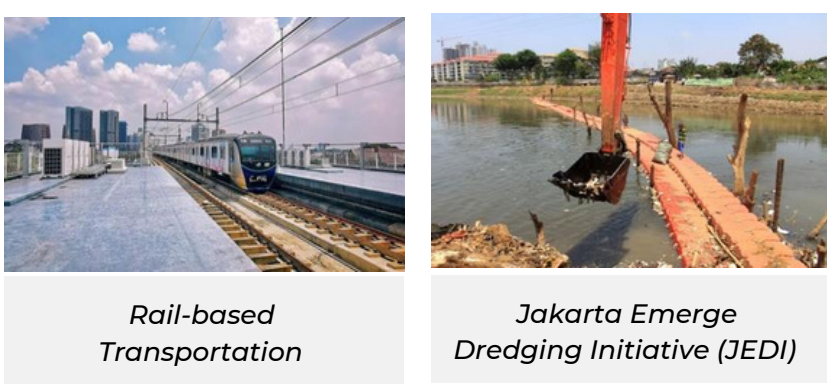
Pembangunan RPTRA

Penataan Kawasan dan PKL

3 Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)



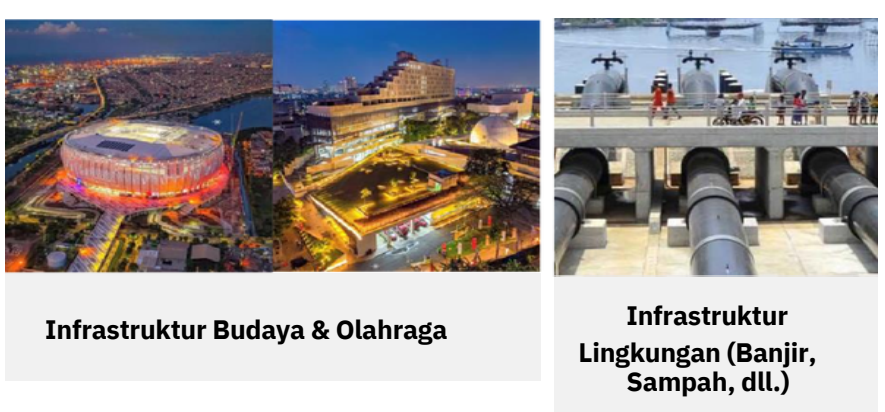
4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri



Rail-based Transportation

Jakarta Emerge Dredging Initiative (JEDI)

5 Pinjaman Pusat -Daerah



Infrastruktur Budaya & Olahraga

Infrastruktur Lingkungan (Banjir, Sampah, dll.)

6 Anggaran Pemerintah (APBN/APBD)

TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA

01

Jakarta Menuju Kota Global

Pengelolaan Keuangan berstandar Internasional

- Penyesuaian Kebijakan Akuntansi dengan Standar Internasional
- Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dengan standar transaksi digital Internasional

02

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan usaha

Penyesuaian Pengelolaan Keuangan Pemerintah dengan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha

03

Public Service Obligation

Penyesuaian Kebijakan Akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan *Public Service Obligation*

04

Kebutuhan Akuntansi Manajemen

Fungsi akuntansi tidak hanya sebatas penyusunan Laporan keuangan tapi juga mencakup Akuntansi Manajemen.



TERIMA KASIH



BPKD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH - PROVINSI DKI JAKARTA